



# RT-RW Diminta Proaktif Pantau Warga Sakit

Hal. 4, 17 Feb.

## Layanan Kesehatan Gratis di Kubu Raya



**Muda Mahendrawan**  
Bupati Kubu Raya  
Ada atau tidak ada BPJS, yang penting punya KTP Kubu Raya, maka akan dilayani secara gratis. Jadi, kalau ada warga kita yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas masih bayar, laporkan ke kami. Ini kebijakan bupati.

mampu, maka cepat usulkan bantuan sosial ke bupati," ujarnya.  
Lebih rinci, ia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengalokasikan bantuan sosial tidak terencana untuk warga yang kesusahan. Seperti mengalami musibah kebakaran, rumah hancur terkena puting beliung ataupun tertimpa pohon tumbang, atau yang mengalami sakit dan benar-benar tidak mampu.  
"Silakan secepatnya diusulkan bantuan. Kita ada skema bantuan sosial tidak terencana untuk membantu warga tersebut," terangnya.

**KUBU RAYA, SP** - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam meminta kepada seluruh pengurus RT dan RW untuk proaktif mengajak warga yang sakit agar berobat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.

jakan bupati. Nah, tolong dipantau kalau ada warga kita yang sakit, jangan tunggu lagi. Segera difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas atau RSUD," tuturnya kepada Pengurus RT dan RW peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT dan RW Kabupaten Kubu Raya di Hotel Dangau Kubu Raya, Rabu (15/2).

Yusran menyebut layanan kesehatan di seluruh Puskesmas di Kubu Raya telah digratiskan oleh pemerintah kabupaten sejak 2019 lalu. Begitu juga dengan RSUD Kubu Raya yang telah menggratiskan layanan kesehatan mulai tahun ini.  
"Ada atau tidak ada BPJS, yang penting punya KTP Kubu Raya, maka akan dilayani secara gratis. Jadi, kalau ada warga kita yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas masih bayar, laporkan ke kami. Ini kebijakan bupati."

Tak hanya itu, lebih jauh Yusran menjelaskan jika ada warga tidak mampu yang sakit dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, maka pemerintah kabupaten juga siap membantu.  
"Kalau Puskesmas dan RSUD Kubu Raya tidak mampu melayani dan pasien harus dirujuk, misalnya ke RSUD Sudarso atau bahkan sampai ke Jakarta. Kalau memang ini warga tidak

Bahkan, lanjutnya, jika memang diperlukan BPJS, maka Dinas Kesehatan Kabupaten siap memfasilitasi.  
"Kalau tidak bisa BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) nasional, kita ada alokasi untuk PBI daerah melalui dana APBD kita, bukan dari Kementerian Sosial" sebutnya.  
Karena itu, ucap Yusran, tidak ada alasan bagi warga Kubu Raya untuk khawatir terkait dengan biaya pengobatan.  
Ia pun meminta kepada seluruh pengurus RT dan



**AJAK PROAKTIF** - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam meminta kepada seluruh pengurus RT dan RW untuk proaktif mengajak warga yang sakit agar berobat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.

RW agar menyosialisasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan tersebut kepada seluruh warga masyarakat.  
"Nah, kita berharap bersama-sama kita bisa sosialisasikan ini ke warga kita dan terus memantau. Jangan sampai sudah viral di media sosial baru kita kebakaran jenggot. Usahakan sama-sama kita pan-

tau warga kita, kalau ada yang dapat musibah sakit secepatnya kita fasilitasi," ajaknya.  
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pemerintah kabupaten sangat fokus pada upaya-upaya percepatan di dalam pelayanan-pelayanan publik. Meskipun sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Barat, Kubu Raya mempun-

yai beban jumlah penduduk yang cukup besar.  
"Karena penduduknya besar, jumlah keluarganya juga besar. Berarti beban pelayanannya juga besar," ujarnya.  
Terkait hal itu, Muda memastikan pihaknya sangat serius untuk bisa mendaratkan pelayanan langsung ke masyarakat. Karena itu, semua kebijakan terus di-

kawal secara konsisten.  
"Kita lebih utamakan hal-hal yang langsung melekat dengan masyarakat. Sebab, masyarakat ini ingin pelayanan yang cepat. Karena itu kita lebih memilih mengutamakan dulu kepentingan masyarakat banyak karena ini adalah bentuk keberpihakan daripada kebijakan pemerintah daerah," ucapnya. (twu)

